

**EVEKTIVITAS ALOKASI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PASKA PEMEKARAN WILAYAH
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT**

Robby Djefry Lakatua

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Abstract: *This study aimed to determine the effectiveness of Allocation of Income and Expenditure (Budget) post-division of the Public Service Territory. Data analysis method used is the analysis of Chi Square (X2). Chi-squared test is a test about the comparison between the observed frequencies that actually happened/actual frequency hopes/expectations.*

The results showed that that the answer to the public / respondent obtained (X2) count of 464, and when compared with the X2 table at the degrees of freedom (df) = 1 with a significant level of 95% and 5% error level is equal to 3,841, in view of (X2) count is greater than (X2) table: $464 > 3.841$, the null hypothesis (H_0) is rejected and the alternative hypothesis (H_a) is received, so the supposition (hypothesis) in this study that states that after the expansion area in West Seram regency , budget allocations can better support the public services specialized first four areas of public services are the focus of research can be received.

From the results obtained from this study indicate that the budget allocations to the sector of public services (education, health, people's economy and SMEs as well as infrastructure and roads) shows that fund budget allocations greatly affect the rate of progress of local development (public service), the high / large expenditures undertaken by local governments to finance public services in general will further accelerate the growth and development of the area in the direction needed by the community/ public, so that the sector of the regional economy will expand faster as multiflier effect of public expenditure intent , In general development budget allocations West Seram regency experienced a significant increase in support of public services.

Keywords: *Effectiveness, Budgets, Regional Expansion.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Seram Bagian Barat secara yuridis terbentuk pada tanggal 18 Nopember 2003 berdasarkan undang-undang No.40 Tahun 2003 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah. Kabupaten, dengan luas 84.081 Km 0 secara geografis Kabupaten Seram Bagian Barat terletak antara 2° 55 -3° 30 Lintang Selatan dan 127° - 55° Bujur Timur. Kabupaten Seram Bagian Barat dibatasi oleh laut

seram, disebelah utara Laut Banda, Laut Buru di sebelah barat, dan Kabupaten Maluku Tengah di Sebelah Timur.

Kabupaten Seram Bagian Barat secara geografis memiliki Wilayah daratan sebesar 6.948,40 Km², yang terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan. Kecamatan yang paling luas adalah kecamatan Taniwel, yang memiliki luas sebesar 1.181,32 Km² atau sebesar 17% dari keseluruhan luas Kabupaten Seram Bagian Barat. Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 173 222 orang dengan laju pertumbuhan sebesar 2, 58% laju pertumbuhan penduduk memang belum begitu banyak, tetapi penduduk tersebut bermukim di kampung-kampung yang jaraknya cukup berjauhan, sehingga memerlukan sarana dan prasarana serta biaya yang besar untuk membangun masyarakat dan wilayah yang sangat luas tersebut.

Walaupun alokasi dana APBD Kabupaten Seram Bagian Barat selama ini tampaknya cukup besar namun belum sepenuhnya di rasakan oleh seluruh warga masyarakat yang letaknya sangat jauh di pelosok dusun dan kampung-kampung. Dengan adanya paradigma baru dalam pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat reformasi serta perubahan struktur dan sistem penerimaan migas ke non migas, maka perubahan sumber utama investasi dari sektor pemerintah ke sektor swasta, dan pengoptimalan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dari masalah kesenjangan daerah dan pusat serta antar daerah yang satu dan yang lainnya.

Melihat jauhnya rentang kendali dalam Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, maka di perlukan upaya pendekatan pelayanan kepada masyarakat sehingga di harapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik dan efektif dari pemerintah daerah. Untuk pembiayaan pemerintah dalam kaitanya dengan pelayanan publik, perlu alokasi dana yang mencukupi dalam APBD, seperti yang tertulis dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mana pendapatan daerah di kelompokkan menjadi:

1. Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selain sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil Pendapatan Asli Daerah yang dikelola pemda, pemerintah daerah masih juga menerima dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum untuk propinsi di alokasikan berdasarkan rumusan (% bobot) x (dana alokasi umum propinsi), sedangkan dana alokasi umum untuk Kabupaten/Kota dirumuskan (% bobot) x (dana alokasi umum untuk Kabupaten/Kota).

Tinggi rendahnya bobot daerah ditentukan oleh variabel kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Kemudian sebagai variabel potensi daerah, digunakan potensi industri, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi domestik regional bruto yang ada di masing-masing daerah, untuk

menentukan tinggi rendahnya bobot tersebut di bentuk sekretariat bidang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang harus bersifat objektif dan independen serta bersifat transparan dalam pengalokasian dana alokasi umum tersebut.

Selanjutnya dana alokasi khusus diberikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak tanpa menggunakan sistem pembobotan, karena nantinya akan di tentukan presentasi minimum dana pendamping yang berasal dari APBD serta keterlibatan Menteri-Menteri Sektoral dalam menentukan dana alokasi khusus itu sesuai dengan sektor kegiatan yang ada.

Untuk Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah kemampuan daerah di bidang keuangan untuk mencukupi penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik. Dengan di berlakukannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002. Tentang Pembentukan beberapa Kabupaten baru di Propinsi maka diharapkan pelayanan pemerintah Kabupaten kepada publik akan lebih meningkat, hal itu di tegaskan pada konsideran point C dalam Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

Dalam bidang pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat, secara umum pelayanan tersebut antara lain terdiri dari: pelayanan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang prasarana jalan dan jembatan, bidang peningkatan ekonomi rakyat dan pengusaha kecil, bidang PDAM, bidang pengairan, bidang pasar, bidang sampah, bidang listrik, bidang pemadam kebakaran, bidang jasa-jasa.

Sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah dan prioritas pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat maka diutamakan pelaksanaan pelayanan publik pada 4 (empat) jenis pelayanan publik yaitu: pelayanan publik di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang prasarana jalan dan jembatan, bidang peningkatan ekonomi rakyat dan pengusaha kecil.

Sesuai dengan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, APBD sebelum dan sesudah pemekaran wilayah 2004 s/d 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat
Sebelum Pemekaran

Uraian	Sebelum Pemekaran				
	2000	2001	2002	2003	2004
Penerimaan	70 350 293 00	254 331 914 000	310 812 422 462,69	365 114 920 737,44	401.256.061.000
Pengeluaran	239 632 122 000	224 152 733 00	302 966 898 306,80	355 556 754 354,97	401.256.061.00
a. Belanja Aparatur Daerah	197 745 678 000	211 763 143 000	232 585 913 491,80	258 126 465 702	203.462.542.950
b. Belanja Pelayanan Publik	28 684 989 000	12 389 630 000	70 380 984 815,00	97 430 298 652,97	197.793.518.050

Sumber : Kabupaten Seram Bagaian Barat dalam Angka Tahun 2012

Tabel 2
Realisasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat
Setelah Pemekaran

Uraian	Setelah Pemekaran					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Penerimaan	401.256.061.000	626.165.394.284,59	614.343.870	415.624.476	417.968.262	451.302.818
Pengeluaran	401.256.061.000	533.032.411.201,01	637.635.970	516.253.424	535.797.905	466.302.818
a. Belanja Aparatur Daerah	203.462.542.950	194.902.778.197,01	321.617.800	148.143.117	181.013.713	210.449.570
b. Belanja Pelayanan Publik	197.793.518.050	338.129.633.004,00	314.483.960	280.512.475	319.265.352	221.545.348

Sumber : Kabupaten Seram Bagian Barat dalam Angka Tahun 2012

Penjelasan tabel 1 dan tabel 2 di atas menarik perhatian untuk membahas mengenai efektivitas alokasi dana APBD paska pemekaran wilayah pada pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi Pemerintah

Mekanisme proses legislasi dan regulasi mendorong pemerintah daerah untuk memikirkan kembali amanat kepada masyarakat dan mempertimbangkan bagaimana pelayanan kepada publik dibiayai di masa yang akan datang. Tujuan dari proses lokal *Services Realignment* adalah mengurangi pemborosan dan pengulangan meningkatkan akuntabilitas dan menyediakan layanan yang lebih dengan menekan biaya yang serendah-rendahnya kepada para pembayar pajak. Dengan terbatasnya dana bantuan, maka salah satu pendapatan yang dapat diperoleh adalah biaya pengguna (*user fee*).

Biaya pengguna merupakan sumber pendapatan yang masuk akal untuk dapat mendanai beberapa layanan publik sehingga terdapat faktor-faktor yang harus di pertimbangkan dalam menyusun kebijakan biaya pengguna. Pertimbangan lain yang terkait terhadap penentuan biaya pengguna adalah peran publik dan politik, artinya pengguna layanan lebih peka kepada layanan, mengetahui layanan apa yang dibiayai.

Menurut Kelana (1997:63) fungsi pemerintah meliputi 3 (tiga) bagian, yaitu: peranan alokasi (*allocation function*), peranan distribusi (*distribution function*), peranan stabilitas (*stabilitation function*).

Alokasi

Fungsi pemerintah dalam bidang alokasi yaitu untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi di laksanakan secara efisien. Fungsi ini muncul karena tidak semua barang dan jasa yang ada tidak dapat di sediakan oleh pihak swasta, karena adanya kegagalan pasar sehingga perlu campur tangan pemerintah untuk menyediakan barang publik.

Menurut Sadono Sukirno (2000:47) kegagalan pasar adalah ketidak mampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien, dan menimbulkan keteguhan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar ini antara lain di sebabkan oleh manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya terbatas bagi seorang konsumen tertentu, tapi dapat juga dinikmati oleh konsumen yang lain, seperti udara bersih, jalan, pasar, dan lain-lain. Untuk menyediakan barang-barang publik perlu diketahui lebih dahulu berapa jumlah barang yang harus disediakan dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyediakan barang-barang publik dimaksud.

Distribusi

Pemerintah berfungsi sebagai pendistribusi pendapatan, menurut Michael P. Tadaro yang di kutip oleh Haris Munandar (1998:166) antara lain: (a) ukuran distribusi, yaitu besar dan kecilnya pendapatan yang di terima masing-masing, (b) distribusi fungsional, atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi.

Sedangkan menurut Guritno Mangkoesoelarto (2001:6) distribusi pendapatan tergantung pada pemilihan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai ketidakadilan, sedangkan masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi, karena keadilan dapat merupakan kebalikan dari efisiensi, sehingga keadilan harus dipisahkan dari efisiensi.

Stabilisasi

Kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yaitu dengan kebijakan moneter pemerintah dapat mengatur dan mengawasi jumlah uang yang beredar melalui bank sentral untuk disesuaikan dengan kebutuhan jangka panjang, kebijakan moneter juga termasuk bagaimana memikirkan cadangan wajib, tingkat suku bunga, kebijakan pasar terbuka, merupakan komponen bagi kebijakan stabilisasi, sedangkan kebijakan fiskal harus dirancang untuk mempertahankan atau mencapai kesepakatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas, neraca pembayaran luar negeri yang sehat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima.

Sedangkan menurut Sadono Sukirno (2000:47) campur tangan pemerintah diperlukan untuk: (1) menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap terwujud dan penindasan dapat dihindarkan, (2) menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil, (3) mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktek monopoli yang merugikan, (4) menyediakan barang bersama yaitu barang yang penggunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat, untuk mempertinggi kesejahteraan masyarakat, (5) mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi besarnya.

Adapun model-model campur tangan pemerintah dapat berupa: pembuatan peraturan perundang-undangan, membuat kebijakan fiskal dan moneter serta secara

langsung menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi tidak selamanya campur tangan pemerintah dapat menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara sistematis dan terjadi kegagalan pemerintah dalam melaksanakan fungsi alokasi tidak secara efisien.

Ketidak efisiensi pemerintah (Guritno, 2001:50) disebabkan oleh 4 (empat) hal yaitu: informasi yang terbatas; pengetahuan yang terbatas atas reaksi swasta; pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat; dan hambatan dalam proses politik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan hal yang penting dalam sistem pengaturan pelayanan publik, mengingat kebutuhan pelayanan publik merupakan kebutuhan masyarakat luas pada umumnya, dan tidak dapat disediakan oleh swasta, maka pemerintah perlu membuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem pelayanan publik yang baik dan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang ada dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) pelayanan publik harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, (2) biaya yang di berikan dapat terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah, (3) dapat membawa perubahan kepada masyarakat menuju masyarakat yang lebih tertib, aman dan mandiri.

Menurut Suparmoko (1997:198) pemerintah sering kali menentukan tingkat harga di bawah harga yang sebenarnya karena adanya tekanan- tekanan dari kelompok-kelompok tertentu, karena kelompok-kelompok tersebut memerlukan perlindungan pemerintah atau juga dapat disebabkan dari tujuan pemerintahan suatu negara itu sendiri dimana pemerintah tidak harus mencari keuntungan dalam memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya sendiri.

Sedangkan untuk publik utilitas seperti kesehatan, pendidikan, prasarana umum, listrik, air, biasanya pemerintah tidak akan mencari keuntungan dari hasil penjualan barang dan jasa tersebut, sehingga dalam menentukan harganya, pemerintah hanya akan menyamakan antara harga dan biaya rata-ratanya, atau dengan kata lain pemerintah hanya menutupi biaya totalnya saja, sehingga laba yang diperoleh adalah laba wajar (*normal profit*), dengan demikian pelayanan publik akan terus dapat berjalan tanpa adanya istilah rugi walaupun tidak ada keuntungan murni.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah jumlah pegawai yang ada pada instansi Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang terkait dengan tugas pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat dan pengusaha kecil serta prasarana dan sarana jalan, serta masyarakat pengguna jasa layanan publik di kabupaten Seram Bagian Barat yang tinggal di kampung dan perkotaan, seluruhnya berjumlah 950. orang. Untuk keperluan data primer yang di gunakan dalam penelitian

ini, yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dana APBD terhadap pelayanan publik (prioritas) bagi pengguna (*stakeholder*), untuk itu penulis mengambil sampel dengan cara memilih populasi sampel secara purposif, yakni sampel yang di pilih dengan sengaja (non random) karena alasan-alasan di ketahuinya sifat-sifat sampel tersebut (Winarno Surahmad, 1998:101).

Dari populasi yang ada, penduduk di Kabupaten Seram Bagian Barat, ditarik sampel secara *probability sampling* (Sugiyono, 2002:57), yaitu sampling yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk di pilih menjadi sampel dengan teknik *disproportionate random sampling* dan menggunakan tingkat kesalahan 5%. Dengan demikian dari jumlah populasi 94.936 orang dibulatkan menjadi 95.000 populasi maka diperoleh sampel sebanyak 950 dengan proporsi sebagai berikut:

1. Masyarakat yang tinggal di kampung $(60.000/95.000) \times 950 = 559$
2. Masyarakat yang tinggal di kota $(34.900/95.000) \times 950 = 348$
3. Pegawai Negeri Sipil dan anggota DPRD $(400/95.000) \times 950 = 4$

Metode Analisis

Penulis menggunakan metode analisis Chi Kuadrat (X^2). Uji Chi Kuadrat adalah pengujian mengenai perbandingan antara frekuensi observasi yang benar-benar terjadi/aktual dengan frekuensi harapan/ekspektasi. (Alfian Lains, 2003) di mana untuk mengetahui apakah alokasi dana APBD dapat meningkatkan pelayanan publik (4 prioritas) dengan menggunakan rumus:

$$X^2 = \sum \frac{(f_0 - f_n)^2}{f_n}$$

dimana :

X^2 = hasil perhitungan (chi kuadrat)

f_0 = frekuensi yang diamati

f_n = frekuensi yang diharapkan.

Untuk mendapatkan f_n digunakan rumus

$$f_n = \frac{b \times K}{N}$$

dimana :

b = jumlah baris

K = jumlah kolom

N = jumlah sampel

Variabel Penelitian

Untuk menganalisis Efektifitas Alokasi Dana Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apakah pemekaran wilayah terhadap pelayanan publik di Kabupaten

Seram Bagian Barat (SBB) digunakan variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi: (1) Alokasi Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seram Bagian Barat (SBB). (2) Realisasi Pendapatan Daerah. (3) Pengeluaran Daerah. (4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PDRB

Perencanaan pembangunan ekonomi membutuhkan bermacam-macam data statistik sebagai dasar perencanaan dan penentuan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat di capai dengan tepat. Strategi kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya perlu dievaluasi dan di monitor keberhasilannya. Data statistik merupakan ukuran kuantitas, mutlak di perlukan untuk memberikan gambaran keadaan masa lalu dan masa kini, serta sasaran yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Oleh karena itu data statistik merupakan ukuran kuantitas, maka program – program pembangunan yang telah di lakukan dapat dilihat tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalannya berdasarkan data statistik yang sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 3
PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat dan
Pertumbuhannya Tahun 2000 – 2010

Tahun	PDRB atas dasar harga berlaku		PDRB atas dasar harga konstan	
	Nilai (Jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)	Nilai (Jutaan Rp)	Pertumbuhan (%)
2000	230.494,36	-	224.082,29	-
2001	244.587,54	12,127	226.088,70	0.895
2002	274.249,27	6.114	230.694,70	2.037
2003	290.158,48	5.801	237.787,81	3.075
2004	320.724,89	10.534	245.596,01	3.283
2005	361.002,21	12.558	257.082,29	4.676
2006	384.431,67	6.490	264.420,76	2.854
2007	430.452,87	11.971	276.922,11	4.727
2008	478.348,26	11.126	291.773,28	5.362
2009	532.152,33	12.499	306.839,86	5.163
2010	595.905,88	11.980	319.804,23	4.225

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat.

Besaran produk Domestik Regional Bruto ditunjukkan oleh agregasi Nilai Tambah Bruto (NTB) yang terbentuk di Kabupaten Seram Bagian Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2002 mencapai 124,20 miliar rupiah dan telah berkembang menjadi 430,45 miliar rupiah pada tahun 2010. Dengan demikian selama kurun waktu sembilan tahun terakhir (2002–2010) PDRB Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami perkembangan sebesar 4,05 kali. Demikian pula dengan perkembangan PDRB atas

dasar harga konstan tahun 2000, distribusi persentasenya menurut lapangan usaha yang ada dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan dengan perkembangan persentase sebesar 100% setiap tahunnya

Besarnya perbedaan antara PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar konstan mencerminkan perkembangan perubahan harga ditingkat produsen. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan PDRB di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat dalam tabel 3 di atas.

Untuk lebih jelasnya dalam mengetahui tingkat perbaikan pelayanan publik sebelum pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat dan sesudah pemekaran Kabupaten maka dapat digambarkan dalam Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah dan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah bagi pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4
Perkembangan Realisasi PAD dan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah
Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat

No.	Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Kontribusi PAD Thdp Pendapatan Dearah (%)
1	2000	313.874195.9	1.72
2	2001	306.149.964.1	1.77
3	2002	386.970.110.086	1.61
4	2003	397.381.456.509	0.60
5	2004	362.578.080.508	3.24
6	2005	420.338.638.649	1.81
7	2006	420.699.422.374	3.44
8	2007	397.154.353.109	1.39
9	2008	451.302.817.809	3.39
10	2009	398.065.104.841	0.62
11	2010	479.836.767.786	3.13

Sumber data : Hasil olahan data.

Keterangan : Tahun 2000 s/d 2005 = sebelum pemekaran Kabupaten
Tahun 2006 s/d 2010 = sesudah pemekaran Kabupaten

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa sebelum pemekaran Perkembangan Realiasi PAD dan Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan angka yang tertinggi di tahun 2005 tetapi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah rendah tidak stabil yaitu 1.81 persen, sehingga masyarakat masih merasa kurangnya pelayanan publik, sedangkan setelah pemekaran menunjukkan angka yang stabil pada tahun 2010 dengan kontribusi sebesar 3,13% dan masih di bawah standar angka rata-rata pendapatan nasional yaitu 12,8% sehingga masih dapat di upayakan untuk menstabilkan penerimaan pendapatan daerah dengan cara mengidentifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang baru agar dapat menambah alokasi anggaran demi pelayanan publik yang lebih baik.

Perkembangan Ekonomi

Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perubahan jangka panjang. Sebagaimana yang di kemukakan oleh W.Arthur Lewis dalam bukunya “*The Economic of Growth*”, bahwa para ahli sering kali menggunakan istilah pertumbuhan, kemajuan, atau perkembangan hanya sebagai variasi yang bisa di sebut sebagai sinonim. Perkembangan ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna melakukan evaluasi dan koreksi terhadap program pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan pada masa atau periode yang lalu. Dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan angka PDRB atau dasar harga konsta, karena dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tersebut, pengaruh perubahan harga telah dieliminir, dengan demikian pertumbuhan yang dicerminkan merupakan pertumbuhan riil barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Adapun pertumbuhan PDRB dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Perkembangan Alokasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat

Dengan adanya pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat, maka alokasi dana APBD akan mengalami perubahan terutama mengenai jumlah dana publik yang di tetapkan akan berkurang, namun hal itu tentunya bukan berarti program pembangunan akan berkurang, hal itu di sebabkan alokasi dana tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas wilayah, penduduk dan lain-lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tabel 5
Perkembangan Realisasi Alokasi APBD
Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2001 – 2010

No.	Tahun Anggaran	Realisasi Alokasi APBD (dalam milyar Rp)	Keterangan
1.	2001	254.331.914,00	RAPBD
2.	2002	310.812.422,69	
3.	2003	365.114.929,44	
4.	2004	401.256.061,00	
5.	2005	401.256.061,00	
6.	2006	626.165.394,59	
7.	2007	614.343.870,23	
8.	2008	415.624.476,62	
9.	2009	417.968.262,75	
10.	2010	451.302.818,43	

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat 2012

Arah dan Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Berdasarkan visi Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu “Terwujudnya Seram Bagian Barat yang aman, relegius, maju, demokratis, dan sejahtera”, maka arah dan kebijakan program pembangunan tahun 2000 – 2010 setelah di tetapkan pemekaran sebagai berikut: pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan, kesehatan dan keluarga berencana, kesejahteraan sosial, kependudukan, lingkungan hidup, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan kelautan, kehutanan, koperasi dan ukm, perhubungan, dan fisik prasarana, perindustrian, perdagangan dan investasi.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka yang menjadi kajian data untuk di analisis dalam penelitian ini difokuskan pada: pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat di bidang koperasi dan ukm, prasarana dan sarana jalan.

Sebagai gambaran akan adanya peningkatan pelayanan publik pada 4 (empat) bidang tersebut dapat dilihat alokasi dana APBD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Tahun 2000 - 2010.

Tabel 6
Alokasi Dana APBD Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap 4 (empat)
Bidang Pelayanan Publik Sebelum dan Sesudah Pemekaran

Bidang	Sebelum Pemekaran				
	2000	2001	2002	2003	2004
Pendidikan	7,104,260,069,000	34,895,697,613,000	40,660,104,264	44,230,800,400	46,947,262,035
Kesehatan	9,237,740,697,000	7,773,425,472,000	9,132,214,000	11,328,901,000	12,261,115,450
Ekonomi dan UKM	6,727,11,735,072	637, 270,7573,00	981,035,381	5,697623,000	7,347,290,000
Prasarana Jalan	29,347,906,067	37,249,263,220	47,281,039,000	46,576,406,000	69,576,435,087

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat

Tabel 7
Alokasi Dana APBD Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap 4 (empat)
Bidang Pelayanan Publik sebelum dan sesudah Pemekaran

Bidang	Sesudah Pemekaran					
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendidikan	46,480,670,025	47,652,142,113	49,947,881,000	50,426,025,826	48,338,315,920	49,671,926,624
Kesehatan	11,347,850,300	11,228,732,956	12,205,402,087	13,727,287,500	15,121,375,826	16,652,918,036
Ekonomi dan UKM	1.403,735,000	1,350,403,320	787,450,035,	1,350,000,000	981,039,025	884,113,530
Prasarana Jalan	47,425,980,000	45,750,450,300	52,347,735,900	40,358,566,586	57,490,094,551	83,142,285,756

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat

Arah dan Kebijakan Pelayanan Publik

Arah dan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam memberikan pelayanan publik merupakan program-program dan proyek yang dapat menunjang pembangunan. di bidang antara lain: program pendidikan pra sekolah, program pendidikan dasar (wajib belajar), program pendidikan menengah/kejuruan dan perguruan tinggi, program pendidikan dan pelatihan masyarakat, program pendidikan tinggi, program diklat aparatur, program kesehatan, program pembinaan keagamaan, program pengembangan dan pemantapan usaha ekonomi masyarakat, program peningkatan kelembagaan dan sumber daya masyarakat pedesaan, program pengembangan jaringan jalan, dan program pembangunan, peningkatan dan rekapitulasi jaringan transportasi.

Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh pada tingkat kemajuan Pembangunan Daerah (pelayanan publik), semakin tinggi pengeluaran yang di lakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, terutama usulan dan pertumbuhan pembangunan daerah ke arah yang dibutuhkan masyarakat/publik, sehingga sektor ekonomi daerah akan berkembang lebih cepat sebagai multifier efek dari pengeluaran pemerintah daerah tersebut. Untuk dapat memenuhi belanja pelayanan publik, diperlukan sumber pendapatan daerah paling kurang sama dengan kebutuhan belanja tersebut, namun demikian belanja publik dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya untuk pembangunan saja, tetapi juga di butuhkan untuk mengoperasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri.

Karena itu pembiayaan (pendapatan dan belanja) perlu dikelola dengan benar dan tepat oleh pemerintah daerah bersama masyarakat agar kemampuan keuangan daerah terkendali. Artinya pemerintah daerah bersama masyarakat mengefektifkan dan mengefisienkan program/kegiatan belanja pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan prioritas yang disepakati bersama melalui proses partisipatif untuk merencanakan selama jangka menengah dan juga berkomitmen bersama memikirkan dan bertindak dalam memberi kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan penguatan ekonomi lokal/daerah. Perkembangan alokasi APBD (dalam %) Kabupaten Seram Bagian Barat pada sektor pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Program Pelayanan Publik sebelum Pemekaran Wilayah

Tampak dalam data penyebaran program dan proyek, ada beberapa kecamatan yang nilai program proyek sangat kecil dan ada yang hanya mendapatkan sedikit saja, hal ini menunjukkan betapa susahny memberikan pelayanan publik apabila wilayah pemerintahan kabupaten sangat luas dan penduduknya terpencar-pencar tanpa adanya fasilitas yang memadai untuk dapat menjangkau wilayah kecamatan dan kampung dan dusun yang ada tersebut.

Kendala pelayanan publik tersebut selain dari masalah transportasi dan prasarananya yang paling penting adalah sumber dana dan sumber daya manusia kurang

memadai untuk membiayai dan melayani masyarakat di daerah yang lebih luas dan terpencil serta sulit dijangkau oleh aparat pemerintah. Sepintas terlihat bahwa dana yang di alokasikan untuk pembangunan kota Seram Bagian Barat cukup besar, namun dana tersebut dipergunakan untuk pelayanan publik sebagai sektor masyarakat yang tersebar pada 11 Kecamatan dan 222 desa dan dusun, sehingga jumlah besar dana tersebut tidak mampu terserap oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Program Pelayanan Publik setelah Pemekaran Wilayah

Secara yuridis formal pemekaran Kabupaten berlaku dilaksanakan sejak Undang- undang No. 26 Tahun 2002 di sahkan dan di undangkan yaitu sejak tanggal 11 Desember 2002, di mana Kabupaten Seram Bagian Barat sudah terpisah dengan Kabupaten- Kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), dan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Kabupaten Seram Bagian Barat sudah mulai membenahi wajah kota dengan prasarana dan sarana umum yang sangat menonjol setelah dimulainya pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat Pasca Pemekaran Kabupaten adalah:

1. Bertambahnya Lembaga pendidikan dasar dan menengah maupun lembaga pendidikan tinggi kerja sama, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, maupun perguruan tinggi yang ada di sekitar Kabupaten perguruan tinggi yang berasal dari luar kabupaten dengan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Setempat.
2. Bertambahnya tenaga medis (dokter) yang didatangkan dari Jakarta, dan bekerja sama dengan UKI Jakarta dan Universitas Atmajaya Jakarta dalam mendidik tenaga medis/dokter/anak-anak Bangsa dari Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Di bidang ekonomi rakyat, Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat sudah berupaya sekuat tenaga untuk menyalurkan bantuan-bantuan Permodalan Koperasi, KUD dan Kopermas-Kopermas kemandirian ekonomi rakyat kecil.
4. Di bidang prasarana dan sarana jalan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat sudah berupayah merubah wajah kota Seram Bagian Barat, yang dulunya jalan yang sempit hanya dapat dilalui pada satu jalur, dan sekarang telah menjadi dua jalur, begitu pula dengan kendaraan angkutan umum, baik swasta ataupun milik pemerintah sudah tampak memadati jalur-jalur lalu lintas yang ada di Seram Bagian Barat.

Selain itu yang nampak dalam kota Seram Bagian Barat ataupun desa dan dusun yang ada di pinggiran kota Seram Bagian Barat sudah mulai tertata dengan baik dan tidak ada satupun rumah yang beratap daun sagu dan kelapa di dalam kota ataupun pinggiran kota seperti tahun-tahun sebelum pemekaran.

Alokasi Dana APBD Kabupaten Seram Bagian Barat

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan/pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk 1 (satu) tahun, di samping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap pengeluaran dan pendapatan di masa yang akan datang. Sejak tahun 1967 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di Indonesia disusun dan

diberlakukan mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya, namun khusus untuk tahun 2000, tahun anggaran dimulai pada tanggal 31 Maret berakhir pada tanggal 31 Desember dan untuk tahun -tahun berikutnya tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat di Daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tugas dan kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan barang dan jasa yang dampaknya bersifat lebih terbatas bagi penduduk di suatu wilayah tertentu, seperti dalam hal prasarana dan sarana jalan, sedangkan penyediaan barang publik yang mempunyai dampak sangat luas seperti mempertahankan keamanan, peradilan dan kesehatan masyarakat, sebaiknya menjadi tanggungjawab pemerintah.

Sesuai pedoman tersebut di atas maka sejak tahun anggaran 2003 Kabupaten Seram Bagian Barat sudah menggunakan sistem anggaran kinerja, seperti yang diamanatkan dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dan seterusnya akan di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di maksud. Untuk dapat memenuhi belanja pembangunan daerah (pelayanan publik), diperlukan sumber pendapatan daerah paling kurang sama dengan kebutuhan belanja tersebut. Sesuai dengan data Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat, APBD selama kurun waktu tertentu mengalami kenaikan hal itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Realisasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat (dalam %)
Tahun Anggaran 2001s/d 2010

Uraian	Tahun Anggaran (%)									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Realisasi APBD	22,20	17,47	9,89	8,31	14,60	-1,97	32,35	98,36	80,58	7,97

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dari data di atas, presentase kenaikan APBD dapat dirata-ratakan sebesar 45% dengan kenaikan tertinggi pada tahun 2008 sebesar 98,36% yang di sebabkan Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat mendapat perimbangan dari Pusat yang cukup besar, namun tahun berikutnya hanya mencapai 80,58% saja, hal ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pusat tidak stabil dan mengindikasikan perlunya percepatan pertumbuhan ekonomi lokal agar dapat memberi kontribusi penerimaan yang stabil kepada daerah, indikasi ini mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi dana perimbangan terutama dana bagi hasil yang berhubungan langsung dengan sumber daya dan potensi daerah.

Untuk alokasi APBD 2010 tercatat dalam RAPBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.451.302.818,43 hal itu terjadi karena kurangnya pendapatan Kabupaten Seram Bagian Barat yang berasal dari dana perimbangan dan DAU. Data

tersebut di atas secara keseluruhan sebenarnya menunjukkan angka kenaikan 12,5% bila tidak terjadi pemekaran Kabupaten, namun dengan pemekaran tersebut masing-masing Kabupaten dapat mengatur pembangunan, masyarakat masing-masing sesuai dengan kondisi setempat, untuk sementara dana yang dialokasikan untuk Kabupaten-Kabupaten baru hanyalah dana alokasi umum (DAU) mengingat Kabupaten baru belum mempunyai pendapatan lain-lain yang perlu dianggarkan.

Uji Kepuasan Responden/Masyarakat terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan Publik merupakan tugas dari pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap segenap warga masyarakatnya. Adapun jenis pelayanan publik yang penulis tanyakan kepada masyarakat/responden, adalah pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan pengusaha kecil menengah, serta pelayanan publik di bidang prasarana jalan dan jembatan. Pengambilan responden ini hanyalah untuk kepentingan penelitian ilmiah semata-mata yang dalam hipotesis pada bab II membuat asumsi bahwa diduga setelah pemekaran wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat alokasi dana APBD dapat lebih menunjang pelayanan publik.

Dari pengelolaan data kuisioner terhadap responden yang berkaitan dengan penelitian ini sebanyak 950 responden yang terdiri dari kelompok I (yaitu masyarakat yang tinggal di kampung-kampung) sebanyak 599 responden kelompok II (masyarakat yang tinggal di kota Seram Bagian Barat sebanyak 348 responden) dan kelompok III (pegawai negeri dari anggota DPRD sebanyak 3 responden), hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Jawaban Responden Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik
2(dua) Tahun Terakhir dan Harapan Setelah Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Barat

No.	Jawaban Responden	Kelompok I		Kelompok II		Kelompok III		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Ya (lebih menunjang pelayanan publik).	491	82	313	90	3	100	807	76,5
2.	Tidak (tidak dapat menunjang pelayanan publik).	108	18	35	10	0	0	143	23,5
Jumlah		599	100	348	100	3	100	950	100

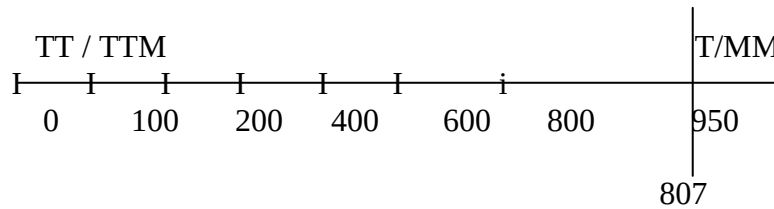
Sumber data : Hasil olahan data.

Dari data tabel tersebut menunjukkan jumlah respondennya adalah 950, dimana tanggapan/jawaban dari 3 (tiga) kelompok responden yang menjawab ya (lebih menunjang) sebanyak 807 responden (76,5%) sedangkan yang menjawab tidak (tidak dapat menunjang) sebanyak 143 responden (23,5%).

Dengan demikian, kalau masing-masing kategori di beri skor dengan angka 1 yang menjawab ya (lebih menunjang) dan 0 untuk menjawab tidak (tidak dapat menunjang), maka akan didapatkan skor sebagai berikut:

- a. Jumlah skor untuk 807 responden Menjawab ya $= 807 \times 1 = 807$
 b. Jumlah skor untuk 143 responden yang menjawab tidak $= 143 \times 0 = 0$
 J u m l a h $= 807$
 Jadi : untuk skor tertinggi $= 807 \times 1 = 807$
 Untuk skor terendah $= 143 \times 0 = 0$

Berdasarkan nilai skor di atas secara terus menerus (*continual*) dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari data pada gambar tersebut bahwa diperoleh 807 terletak pada kelompok responden yang merasakan peningkatan pelayanan publik dan menyetujui harapan yang lebih baik setelah pemekaran wilayah yang jumlahnya mencapai 76,5%. Selanjutnya agar dapat menjelaskan korelasi yang benar dalam menentukan pendapat responden dengan yang di harapkan dalam hipotesis penulisan ini dan dapat pula dilihat dalam analisa uji Chi Kuadrat berikut ini:

Tabel 12

Distribusi Frekuensi yang diharapkan Dalam Jawaban Responden Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Kabupaten Seram Bagian Barat

No.	Frekuensi	Responden			Jumlah
		Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	
1.	Yang di amati	599	348	3	950
2.	Diharapkan (<i>Expected</i>)	950	950	950	950

Sumber data : Hasil olahan.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah frekuensi yang di amati bervariasi, dimana banyaknya harapan pada posisi makin ke kanan, sedangkan posisi ke dalam harapan semakin kecil. Karena jumlah seluruh kelompok yang di harapkan adalah 950, sedangkan jumlah kelompok responden adalah 3 kelompok maka jumlah frekuensi yang di harapkan rata-rata adalah $950 : 2 = 475$.

Tabel 13

Frekuensi f_0 dan f_h dari 950 Responden Tentang Jawaban Masyarakat Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik

No.	Tanggapan responden	F_0	F_h
1.	Ya	807	475
2.	Tidak	143	475

Sumber : Hasil olahan data.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan efektifitas dan harapan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Seram Bagian Barat paska pemekaran wilayah dapat di lakukan analisa Chi Kuadrat sebagai berikut:

Tabel 14
Analisis Chi Kuadrat (χ^2) tentang Pelayanan Publik

No	Tanggapan responden	F0	Fh	F0 - Fh	(F0 - Fh) ²	$\frac{(F0 - Fh)^2}{Fh}$
1.	Ya	807	475	332	110224	232,050
2.	Tidak	143	475	-332	-110224	232,050
J u m l a h		950	950	0	0	464

Sumber : Hasil olahan data.

Sesuai hasil hitungan Chi Kuadrat (χ^2) bahwa jawaban masyarakat/responden di peroleh (χ^2) hitung sebesar 464, dan bila di bandingkan dengan χ^2 tabel pada derajat kebebasan (dk) = 1 dengan tingkat signifikan 95% dan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 3,841, mengingat (χ^2) hitung lebih besar dari (χ^2) tabel : $464 > 3,841$, maka hipotesis nol (H_0) di tolak dan hipotesis alternatif (H_a) di terima, sehingga dugaan (hipotesis) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa setelah pemekaran wilayah di Kabupaten Seram Bagian Barat, alokasi dana APBD dapat lebih menunjang pelayanan publik terlebih khusus empat bidang pelayanan publik yang menjadi fokus penelitian dapat diterima.

Efektifitas Alokasi Anggaran terhadap Peningkatan Pelayanan Publik

Dari data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi dana APBD pada sektor pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan UKM serta prasarana dan sarana jalan) menunjukkan bahwa sebelum pemekaran wilayah dana yang dianggarkan tidak dapat diprogramkan pada semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat, dan kalau dilihat lebih banyak dilakukan kegiatan (proyek pada lokasi Kecamatan) Kecamatan yang lebih dekat atau mudah dijangkau dari Kabupaten Seram Bagian Barat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel penyebaran program/proyek di Kabupaten Seram Bagian Barat sebelum dan sesudah pemekaran Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 15
Penyebaran Program / Proyek di Kabupaten Seram Bagian Barat

No.	Jenis Pelayanan Publik	Kecamatan yg Mudah di Jangkau (7 Kecamatan)	Kecamatan yg Sulit di Jangkau (4 Kecamatan)
1.	Pendidikan	352 Paket program/proyek	119 Paket program/proyek
2.	Kesehatan	354 Paket program/proyek	120 Paket program/proyek
3.	Ekonomi Rakyat & UKM	358 Paket program/proyek	146 Paket program/proyek
4.	Prasarana & Sarana Jalan	316 Paket program/proyek	130 Paket program/proyek

Sumber : Hasil olahan data.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 11 Kecamatan yang merupakan Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat setelah pemekaran. Hal tersebut membuktikan bahwa pelayanan publik tersebut di atas tidak dapat memberikan secara merata kepada seluruh masyarakat di kabupaten Seram Bagian Barat setiap tahunnya.

Secara praktis bahwa dana alokasi APBD akan berpengaruh pada tingkat kemajuan pembangunan daerah (pelayanan publik), semakin tinggi/besar pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membelanjai pelayanan publik umumnya akan semakin mendorong percepatan dan pertumbuhan pembangunan daerah ke arah yang dibutuhkan oleh masyarakat/publik, sehingga sektor ekonomi daerah akan berkembang lebih cepat sebagai *multiplier* efek dari pengeluaran pemerintah daerah dimaksud. Secara umum perkembangan alokasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami kenaikan yang cukup, tetapi dengan luasnya jangkauan wilayah sehingga dana tersebut kurang mendapatkan hasil yang berarti. Di lain pihak setelah pemekaran Kabupaten dana alokasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat berkurang hingga mencapai 54%, namun dilihat dari program/proyeknya lebih merata pada semua masyarakat yang ada di Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Keefektifan alokasi dana APBD pada sektor pelayanan publik dapat dilihat dari jumlah dana yang dialokasikan, jumlah warga masyarakat yang menikmatinya dan tempat penyebaran pelayanan publik tersebut terdapat di semua tempat/lokasi dimana masyarakat bermukim yaitu di semua Kecamatan dan Kampung yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Lains, *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi* Jilid 1, LP3ES Jakarta 2003.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Metode Aplikasi*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2003.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, *Maluku Dalam Angka*, Beberapa Terbitan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Barat, *Seram Bagian Barat Dalam Angka*, Beberapa Terbitan
- Kelana, Said, *Teori Ekonomi Makro*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.
- Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis* Penerbit Jakarta, Erlangga 2003.
- Mangku Subroto Guritno, *Ekonomi Publik*, BPFE UGM Yogyakarta, 2001
- Sumarso, SA, *Akuntansi Suatu Pengantar*, PT. Rineka Cipto, Jakarta 1996.
- Sukirno, Sadeno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Suparmoko, M. *Ekonomi Publik untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, PN Andi, Yogyakarta 2001.

Sugiono, *Statistik untuk Penelitian*, Alfabeta Bandung, 2002

Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Dasar, Metode, Teknik. Tarsito Bandung 1998.